BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai keunikan, sehingga memerlukan perlindungan hukum atas kekayaan nasional yang berada di wilayah Indonesia. Khususnya mengenai perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari hasil pengolahan otak sehingga mampu memproduksi produk ataupun prosedur yang berguna bagi seseorang. HKI dapat diikat selaku hak terhadap kekayaan menimbang dan melahirkan karya intelektual, sebagian pengetahuan, seni, sastra, teknologi dan realisasinya memerlukan pengorbanan, tenaga, waktu, anggaran, serta kreativitas. Terdapatnya pengorbanan dalam hal tersebut, sehingga membuat karya tersebut bernilai.

Konsep kekayaan atas karya intelektual meluas pada fungsi perekonomian yang dapat dinikmati seseorang dan timbul dari nilai ekonomi yang menyatu. Salah satunya bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki daya tarik tertentu dan menggambarkan tipe produk yang menampilkan wilayah asal produk tersebut merupakan Indikasi Geografis.¹

¹Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *JurnalIUS*, Volume 3 Nomor7, April 2015, hlm. 42-43, tersedia di: <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/198> diakses pada 12 Mei 2023

Ketentuan tentang perlindungan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia mulanya ada pada Pasal 56 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya PP No.51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Hingga akhirnya IG diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan tersebut lebih rinci dan tegas lagi dibagi menjadi empat bab, yakni BAB VIII, BAB IX, BAB X, dan BAB XI dimulai Pasal 56-71 dan terdiri dari bagian-bagian sebagai subjudul peraturannya. Ketentuan baru tersebut dengan jelas memuat aturan terkait batas waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan serta pembinaan, dan setiap bagiannya berbeda-beda dengan aturan sebelumnya yang tidak memiliki bagian ketentuan ini.

Pengertian IG sebagaimana tertuang dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Dari pengertian di atas, menyimpulkan bahwa IG merupakan identifikasi produk yang asalnya dari tempat, wilayah, ataupun daerah tertentu dengan memperlihatkan mutu, reputasi, serta faktor alam maupun manusia yang dianggap sebagai instrumen dari produk itu. Indikasi geografis terdiri atas nama, asal usul tempat, dan asal usul suatu benda.

Agar suatu produk berpotensi menjadi produk yang terindikasi secara geografis, produk tersebut harus memenuhi persyaratan obyektif maupun subyektif. Persyaratan obyektif menjadi patokan apakah suatu komoditi dianggap berhasil serta layak dijadikan produk IG. Persyaratan keberhasilan itu diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai yang tercantum dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Persyaratan ini meliputi sistem tata kelola yang kuat serta efektif, pemeliharaan kualitas dan konsistensi produk yang baik, dan pemasaran yang kuat, sehingga pemegang IG dapat terus memenuhi permintaan pasar dengan jumlah yang cukup secara berkelanjutan, dan keinginan penegakkan aturan hukum mengenai indikasi geografis.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang menjelaskan siapa saja yang bisa mengajukan permohonan perlindungan hukum atas suatu IG. Pihak yang bisa mengajukannya yaitu lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat dalam wilayah geografis tertentu yaitu mereka yang menjual hasil alam seperti produsen produk pertanian, kerajinan tangan dan produk industri, ataupun kelompok konsumen komoditi tertentu serta pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten/kota.²

Untuk memperoleh perlindungan tersebut wajib melakukan pendaftaran produk Indikasi Geografis. Pendaftaran diawali dengan menyampaikan permohonan kepada Menteri. Pemohon berdasarkan

²Lily Karuna Dewi(dkk), "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.3, Tahun 2019, hlm. 7, tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/47568>, diakses pada 18 Mei 2023.

undang-undang ini adalah lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mencari produk, pemerintah kota, provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian, barang yang bisa diajukan permohonan meliputi SDA, hasil kerajinan tangan maupun hasil industri.

Mekanisme pendaftaran yaitu mengajukan berkas permohonan pendaftaran IG kepada DJKI yang kemudian akan memeriksa secara administratif maupun substansif. Pemeriksaan administratif dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Jika persyaratan terpenuhi, DJKI akan mengumumkan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran tersebut. Jika telah memenuhi persyaratan, DJKI akan menyerahkannya pada Tim Ahli Indikasi Geografis kemudian akan melaksanakan pemeriksaan substansif dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan sampai dengan dua tahun semenjak diterimanya permohonan pendaftaran. Kemudian, Tim Ahli IG tersebut akan memberikan usulan kepada DJKI untuk mendaftarkannya ke dalam Daftar Umum IG. Dengan demikian, dari usulan tersebut, DJKI dalam periode waktu selambat-lambatnya 30 hari akan mempublikasikan informasi mengenai Berita Resmi Indikasi Geografis dalam waktu tiga bulan. Sesudah pengumumannya tersebut selesai, DJKI selanjutnya akan mempublikasikan Sertifikat Indikasi Geografis.

Batasan waktu perlindungan indikasi geografis tidaklah sama seperti HKI lainnya. Misalnya, suatu merek mempunyai masa perlindungan selama 10 tahun. Sementara itu, IG memberikan perlindungan hukum

terhadap suatu produk sepanjang karakteristik dan mutunya tetap ada setelah didaftarkan. Hal inilah yang mendasari pemberian perlindungan hukum tersebut. Oleh sebab itu, IG akan mendapat perlindungan sepanjang reputasi, kualitas serta ciri yang mendasari pemberian perlindungan tersebut terhadap barang tetap terjaga. Melihat keadaan tersebut, perlindungan geografis di Indonesia merupakan suatu sistem konstitutif yang memerlukan ada syarat registrasi untuk mendapat perlindungan dari negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa IG tidak hanya dimiliki satu orang saja, tetapi secara bersamaan oleh masyarakat yang memproduksi produk IG tersebut.

Indikasi geografis pada hakikatnya adalah kekayaan intelektual yang bersifat komunal, artinya dimiliki secara bersamaan ataupun berkelompok. Suatu produk dengan indikasi geografis tidak bisa dimiliki oleh perseorangan sebab merupakan produk yang mendapat pengaruh dari faktor alam atau manusia serta bukan merupakan hasil penemuan investor, ciptaan manusia, atau ciptaan perseorangan. Lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat di wilayah geografis tertentu adalah perwakilan dari kepemilikan komunal yang merupakan ciri khas indikasi geografis.

Permohonan dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan barang dan/atau produk yang terdiri dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Organisasi seperti asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) termasuk di antara lembaga

tersebut. MPIG adalah kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan indikasi geografis mulai dari penanaman hingga pemasaran dan distribusi. Oleh karena itu, dalam konteks melindungi indikasi geografis, keberadaan MPIG, terutama struktur kepengurusannya, sangat menentukan kinerjanya terutama ketika akan mendaftarkan indikasi geografis.³

MPIG mempunyai peran yang sangat penting selama proses persiapan, pendaftaran, dan pengelolaan IG setelah menerima sertifikat IG.. Sebelum adanya MPIG atau Kelompok Kerja, MPIG harus mengatur pertemuan dan proses penyusunan Dokumen Deskripsi, mengajukan permohonan pendaftaran, menyempurnakan Dokumen Deskripsi, mendampingi pemeriksaan menyeluruh, dan menerima sertifikat IG. Setelah menerima sertifikat IG, MPIG akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, seperti mengelola dan mengembangkan organisasi MPIG, mempertahankan produksi, reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk, meningkatkan pemasaran, meningkatkan pendapatan anggota, dan mengelola secara bijak penggunaan pendapatan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan untuk memperkuat dan mengembangkan MPIG. Selain itu, tanggung jawab

³ Darwance (dkk), “Penyusunan Struktur Kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Sebagai Tahapan Pendaftaran Nanas Bikang Di Bangka Selatan Sebagai Indikasi Geografis”, *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 Juni 2022, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung tersedia di: <https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/download/4682/pdf>), diakses pada 10 Januari 2024

MPIG adalah mengawasi dan mencegah pemalsuan IG serta memprosesnya secara persuasif atau secara hukum.⁴

Dengan terdaptarnya suatu produk Indikasi Geografis, maka nilai keistimewaan suatu daerah dapat meningkat di mata para pelanggan ketika suatu kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan produk Indikasi Geografis tersebut.

Hak yang diberikan dari IG ditegaskan pada Pasal 1 angka 7

“Indikasi geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”.

Seperti merek dagang, indikasi geografis dapat meningkatkan kekuatan pemasaran produk yang dinamis. Karena dimiliki bersama, indikasi geografis dapat menjadi alat yang sangat baik untuk pembangunan ekonomi lokal atau komunitas. Oleh sebab itu, Indikasi geografis tidak dilindungi tanpa adanya permohonan atau permintaan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan IG terhadap produk daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga akan mempengaruhi nama daerah dan mencegah kompetisi tidak sehat menggunakan nama daerah. Perlindungan tersebut mempengaruhi nilai suatu produk sehingga indikasi geografis bisa menggerakkan perekonomian asal produk.

⁴ Peter Damary dan Riyaldi. “*Modul Pelatihan Indikasi Geografis*”. Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP). 2018., hlm 55.

Untuk menjamin keberlangsungan hidup suatu wilayah dengan produk yang terindikasi secara geografis, pemerintah harus dapat menyediakan fasilitas yang sesuai bagi kelompok masyarakat yang mengelola produk tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah maupun pusat harus terlibat dalam pengoperasian produk indikasi geografis. Mereka bertanggung jawab atas penganggaran, pengolahan, dan pengawasan. Pemerintah membantu penganggaran dengan menurunkan biaya produksi melalui tambahan modal, subsidi bahan pokok, dan bantuan lainnya. Mereka dapat berkontribusi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan atau membantu dengan menjamin produksi maksimal. Pemerintah bertanggung jawab untuk memantau penggunaan bantuan, fasilitas, dan hasil karena hasil menunjukkan seberapa baik kesejahteraan masyarakat lokal berdasarkan geografi.

Berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia, menurut hasil riset CIFOR, nanas merupakan komoditas yang produktif, berdaya hasil tinggi, serta ramah gambut selain pinang, ikan, dan madu. Jenis bibit nanas banyak ditanam di lahan gambut di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara (Sarawak, Malaysia).⁵ Tanaman nanas (*ananas comosus*) merupakan tanaman buah semak yang dapat dimakan dan tumbuhan yang penting secara ekonomi yang berasal dari Amerika Selatan.

⁵ Fahmuddin Agus. dan I. G. M. Subiksa. 2008. "*Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian Dan Aspek Lingkungan*". Balai Penelitian Tanah Dan World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor. Indonesia. hlm. 36

Nanas Tangkit merupakan salah satu komoditi yang berpotensi Indikasi Geografis yang berasal dari Provinsi Jambi terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat dua Kecamatan penghasil nanas di Kabupaten Muaro Jambi yakni Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Jambi Luar Kota. Namun Kecamatan Sungai Gelam yang memegang tampuk sebagai penghasil buah nanas terbesar dengan Desa Tangkit Baru sebagai satu-satunya desa penghasil buah nanas. Hal ini dikarenakan Desa Tangkit Baru ditetapkan sebagai desa sentra produksi nanas dan juga di desa tersebut telah dikembangkan menjadi desa agrowisata serta telah terdapat banyak industri pengolahan buah nanas di desa tersebut.

Tangkit Baru memiliki luas lahan yaitu 1.811,2 hektar, dimana lebih dari 985,25 hektar (55%) ditanami nanas. Penduduk daerah ini bergantung kepada perkebunan nanas yang menjadi daerah penghasil nanas dengan harga satuannya yaitu Rp2.000 - Rp6.000. Rata-rata produksinya mencapai 20.000 hingga 25.000 buah/hari atau berkisar 17,5 hingga 20 ton. Nanas Tangkit Baru mempunyai ciri khas yaitu cita rasa manis keasam-asaman, memiliki bentuk lonjong bersisik dan warna kuning bila matang. Tanaman ini dapat tumbuh sempurna di lahan gambut dangkal dengan ketinggian ± 20 mdpl dan pH <5. Sejak tahun 1970, tanaman ini sudah dikembangkan oleh masyarakat Desa Tangkit Baru di Kabupaten Muaro Jambi.

Perkebunan nanas ini awalnya didirikan oleh petani tradisional Sungai Terap yang membuka hutan kemudian membuatnya menjadi ladang dengan berpindah-pindah. Lalu, tahun 1941 hingga 1943, beberapa

penduduknya, termasuk keluarga Penghulu Abu, Penghulu Hamid dan Sham Sudin bin H. Hasan membuka hutan kemudian menjadikannya ladang. Sehingga, mulai saat itu mereka tidaklah lagi berpindah, melainkan menetap di ladang tersebut, kini hutan itu dinamakan Tangkit.⁶

Sesudah pemberian kedaulatan pada tahun 1950, keluarga Gimin bermigrasi dari Pulau Jawa kemudian menetap di Desa Tangkit. Mereka bergabung dengan tiga anggota keluarga mereka sebelumnya untuk membangun perkebunan karet. Sekitar tahun 1953, penduduk Banjar bernama Haji Junet datang untuk membuka lahan di kampung baru. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil. H.Saing dan Paimin kembali ke perkebunan setelah itu, tetapi mereka tidak berhasil. Pada tahun 1968, Sanusi Ja'far yaitu tokoh yang memulai mengolah kayu di Desa Tangkit dan membawa Syekh Muhammad ke Desa Tangkit Baru.

Setelah lima hari melaksanakan penelitian, Syekh Muhammad menyetujui bahwa wilayah itu akan digunakan sebagai perkebunan. Oleh sebab itu, perkembangan perkebunan nanas di Desa Tangkit Baru adalah hasil dari upaya Syekh Muhammad dan rekannya. Mereka berhasil mengubah lahan itu sebagai perkebunan nanas yang kini dinamakan Tangkit Baru sebagaimana dengan kerangka pedoman bahwasannya lokasi operasi yaitu Desa Swasembada atau Swasembada Nanas.

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Dampak Pembangunan Ekonomi Pasar Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Jambi*, 1994, hlm 11.

Pada tahun 2000, berdasarkan SK Menteri Pertanian No.103/kpts/TP.2004/3/2000, nanas yang ditanam di Desa Tangkit Baru dijadikan sebagai produk unggulan Provinsi Jambi dengan nama “Nanas Varietas Tangkit” dan dimasukkan ke dalam kelompok Nanas Queen.⁷

Lisdiana dan Widya Ningsih berpendapat bahwa karakteristik serta jenis varietas Nanas Queen yaitu:

“buahnya berukuran sedang hingga besar, buahnya lonjong dengan bentuk kerucut hingga silindris, mata buah menonjol, kulit buah matang dengan warna kuning, daging buahnya memiliki warna kuning kemerahan dan mempunyai cita rasa manis. Nanas Queen ini mengandung vitamin C berkisar 24,0 mg/ml sari buah. Daunnya pendek, memiliki duri tajam, dan bengkok.”⁸

Nanas Queen mempunyai kandungan antioksidan yang lebih tinggi daripada nanas *smooth cayenne*. Kandungan vitamin C dalam nanas adalah sumber utama antioksidan, yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, kandungan fitokimia nanas, yang terdiri dari flavonoid dan fenol, memiliki kemampuan untuk mencegah pembentukan radikal bebas selama oksidasi lipid serta menghentikan proliferasi sel kanker.⁹

Nanas Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi berpotensi mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis guna meminimalisir terjadinya kompetisi tidak sehat dalam berdagang. Untuk mendapatkan

⁷Andi Junudu (dkk), “Literasi Informasi Petani Nanas dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi”, *Nazharat*, UINSulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 26 Nomor 01, Tahun 2020, hlm. 175, tersedia di : <https://nazharat.fah.uinjambi.ac.id/index.php/nazharat/article/view/25/16>, diakses pada tanggal 22 Maret 2023

⁸Lisdiana dan Widyaningsih Soemadi. “*Budidaya Nenas: Pengolahan dan Pemasaran*”. Solo CV Aneka, Edisi 1, Cet. 1, Probolinggo, 1997, hlm. 14

⁹Isnawati Nurjannah dan Cahyaning Rini Utami, “Karakteristik Tepung Nanas Varietas Queen (*Ananas comosus L.Merr*) Termodifikasi Metode *foam mat drying*,” *Teknologi Pangan: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, Vol.13, No. 1 Tahun 2022, tersedia di : <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/Teknologi-Pangan/article/view/3008> diakses pada 10 Oktober 2023

perlindungan ini, pihak pemohon harus terlebih dahulu mendaftarkan sebagai subyek hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (9) UU No.20 Tahun 2016 bahwa “Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Merek atau Indikasi Geografis.” Definisi pihak yang mempunyai kepentingan ialah lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat dalam wilayah geografis, serta pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Dengan demikian, masyarakat yang ada di daerah tersebut mempunyai kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Desa Tangkit Baru melakukan pembentukan kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Tangkit Baru Jambi, yang dimana pengurusannya terbentuk mulai tahun 2021. Upaya pendaftaran Nanas Tangkit sudah dilakukan sejak tanggal 15 November 2021 oleh MPIG Nanas Tangkit Baru Jambi. Permohonan ini telah diterima dan diumumkan di Berita Resmi Indikasi Geografis pada tanggal 12 Desember 2022 sampai 12 Februari 2023 dengan Nomor Permohonan E-IG.20.2021.000013 dan nama Merek yaitu Nanas Tangkit Baru Jambi.

Menurut Padmo Wahyono, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan maksimal terhadap pengelolaan kekayaan intelektual di daerah secara lebih luas.¹⁰ Kebijakan hukum memuat prosedur membuat serta melaksanakan hukum, dan dapat menunjukkan sifat tegas dan arah pembuatan serta penegakan hukum. Dengan demikian, kebijakan perlu diimplementasikan ataupun ditegakkan oleh pemerintah suatu negara.

¹⁰ Darwance (dkk), “Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual”, *Journal of Political Issues*, Vol. 2, No. 2, Januari 2021, tersedia di: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/download/40/28/> diakses pada 10 Januari 2024

Menangani perlindungan hukum IG di daerah adalah salah satu kewajiban utama pemerintah. Pemerintah daerah hendaknya memprioritaskan komoditi lokal unggulan, terkhusus yang berpotensi indikasi geografis. Pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tiap komoditi bernilai tinggi yang terdapat di daerahnya dan harus dilindungi oleh sistem indikasi geografis. Karena berbagai alasan, hal ini harus dilakukan sebab hak indikasi geografis memberikan hak eksklusif serta keuntungan ekonomi kepada pemiliknya, dan mencerminkan tingkat peradaban maupun budaya masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan dan peraturan untuk melindungi hak indikasi geografis di wilayahnya, sehingga perlu ditetapkan kebijakan dan peraturan. Hal ini merupakan tanggung jawab daerah otonom. Dengan demikian, pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan serta aturan untuk peraturan untuk melindungi hak IG yang ada di wilayahnya karena mereka memperhatikan kekayaan daerah.¹¹

Oleh karena itu, dengan didaftarkannya Nanas Tangkit Baru sebagai komoditi yang terindikasi secara geografis, Kabupaten Muaro Jambi akan mempunyai reputasi yang baik sebagai daerah yang menghasilkan hasil pertanian Nanas Tangkit Baru dan memperoleh manfaat ekonomi yang berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat jika

¹¹NizarApriansyah "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah" *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 4, Desember 2018, tersedia di: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/516> diakses pada 03 Oktober 2023

suatu saat timbul perselisihan ataupun permasalahan sehubungan dengan produk indikasi geografis.

Dalam hal perlindungan hukum atas produk yang terindikasi secara geografis terdaftar, pada kesempatan ini penulis hendak mengetahui realita bagaimana bentuk manfaat ekonomi yang diterima oleh petani Nanas Tangkit, apakah manfaat tersebut sudah sejalan dengan Undang-Undang Indikasi Geografis. Dari pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Optimalisasi Hak Ekonomi Nanas Tangkit Baru Jambi Sebagai Produk Indikasi Geografis”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk manfaat ekonomi bagi masyarakat komunal yang tergabung dalam Kelompok MPIG Nanas Tangkit Baru?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat Tangkit Baru?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk manfaat ekonomi bagi masyarakat komunal yang tergabung dalam Kelompok MPIG Nanas Tangkit Baru.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat petani Tangkit Baru.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan dari penelitian dapat memberi sumbangsih ilmiah yakni ilmu hukum serta yang berkaitan dengan kekayaan intelektual secara umum serta indikasi geografis secara khusus.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bersama dengan masalah yang diteliti diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan ataupun gagasan kepada pihak yang terlibat pada penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, guna mencegah terjadinya perbedaan dalam menafsirkan istilah yang dipergunakan, berikut definisi beberapa istilah yang terkait, yaitu:

1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah jenis hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta dan pihak lainnya yang secara sah menerima hak tersebut. Hak ekonomi tersebut tertuang dalam UU No.28 Tahun 2014 adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya ciptanya. Lisensi didefinisikan sebagai menerima keuntungan ekonomi, yakni pemberian izin tertulis oleh Pemilik Hak Cipta ataupun Pemegang Hak Terkait pada pihak lainnya agar

menjalankan hak ekonomi atas ciptaannya ataupun produk hak terkait menggunakan persyaratan tertentu.¹²

2. Nanas Tangkit Baru

Tanaman ini didefinisikan sebagai salah satu komoditas unggulan yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Sungai Gelam yakni Desa Tangkit Baru. Tanaman ini memiliki rasa khas yaitu manis keasam-asaman. Buahnya memiliki bentuk lonjong dan bersisik, berubah menjadi kuning jika sudah matang. Dalam hal penanaman, tanaman ini dapat tumbuh sempurna di dataran rendah gambut dangkal pada ketinggian ± 20 mdpl dengan $\text{pH} < 5$. Sejak tahun 1970, tanaman ini dikembangkan masyarakat Desa Tangkit dan telah ditetapkan sebagai varietas unggulan nasional dengan nama Nanas Tangkit Baru yang digolongkan sebagai nanas Queen dengan mutu paling baik.

3. Indikasi Geografis

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Jenis tanah, bentang alam, ketersediaan air, ketinggian tempat, serta keadaan iklim tergolong sebagai faktor alam yang dimaksud oleh

¹²Sartika Nanda Lestari, “Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital Di Indonesia”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No.3, November 2019, tersedia di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6550> diakses pada 06 Oktober 2023

indikasi geografis. Sementara itu, faktor manusia meliputi kearifan lokal (praktik serta teknik, misalnya seleksi varietas tanaman) yang berkembang pada bidang budaya, sosial, serta ekonomi tertentu. Kondisi tersebut mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat terkait metode pengelolaan tanaman dan hewan, ataupun mengolah barang dan produk. Terakhir, perpaduan di antara faktor alam maupun manusia yang disebutkan di atas menciptakan suatu komoditi khas dengan ciri unik dari daerah asalnya, dan mengartikan bahwa komoditi dengan ciri yang sama tidak tersedia di tempat lainnya.

F. Landasan Teori

1. Teori Hak Milik

Menurut *Client Earth*, milik mengacu pada sekumpulan hak, termasuk hak menguasai dan mengelola. Hak penguasaan mencakup hak pengelolaan atau pengalihan objek milik. Dalam beberapa hal, hak pengalihan ini bisa diberikan batasan. Contohnya saja dalam hubungan perwalian sehingga upaya untuk pengalihannya hanyalah bisa dilaksanakan apabila dilakukan untuk kepentingan pihak yang ada di bawah perwalian tersebut. Sementara itu, hak mengelola mencakup hak pengelolaan dan pengalihan objek kepemilikan tetapi dengan sifat terbatas. Pemegang hak guna mengelola objek milik bisa menyewa ataupun memberikan haknya pada individu lainnya. Hak tersebut mencakup hak untuk menggunakan objek milik, di mana hakikatnya tidak bisa mengubah objek kepemilikan dengan berbohong. Dengan

demikian, dalam miliki terdapat hak untuk menguasai, mengelola, serta menggunakan objek yang dimiliki.¹³

Paton mengemukakan bahwa, pemilik benda mempunyai hak atas kebendaan miliknya yang meliputi:

- a. Menikmati objek miliknya, seperti dengan mememanfaatkannya.
- b. Hak untuk tidak mengizinkan pihak lainnya untuk merasakan objek miliknya.
- c. Hak untuk memberikan beban jaminan terhadap objek miliknya.
- d. Hak untuk mewariskan objek miliknya.¹⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah efektivitas bermula dari kata “efektif” dengan arti kesuksesan mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan. Selain itu, efektivitas kerap kali ada kaitannya dengan hubungan diantara hasil yang diinginkan dengan yang diraih. Definisi efektivitas ialah keahlian suatu organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya (operasi kegiatan program, ataupun misi) tanpa tekanan atau ketegangan selama implementasi.

Dengan demikian, efektivitas hukum berdasarkan definisi di atas mempunyai arti bahwa indikator efektivitas dalam arti terwujudnya

¹³A'an Efendi, dan Dyah Ochtorina Susanti, “Teori Kepemilikan Tanah”, *Prosiding Seminar Nasional: Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanahan Dalam Rangka Menggali Potensi Daerah*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, April 2018, hal. 6, tersedia di: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/89792> , diakses pada 2 September 2023

¹⁴*Ibid.*, hlm. 4.

tujuan yang sudah ditetapkan adalah ukuran apakah tujuan tersebut tercapai sesuai dengan rencana.¹⁵

Hans Kelsen berpendapat bahwa jika membahas mengenai efektivitas hukum, maka berbicara juga tentang validitas hukum yaitu norma hukum yang sifatnya mengikat, wajib diikuti, dan diterapkan masyarakat. Sementara itu, efektivitas hukum memiliki arti bahwa masyarakat sungguh-sungguh bertindak sebagaimana norma hukum yang harus diimplementasikan serta ditaati.¹⁶

Sedangkan teori fektivitas hukum menurut Soejono Sekanto merupakan efektif ataupun tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, diantaranya: 1). faktor hukum (undang-undang); 2). faktor penegak hukum berupa pihak yang membuat ataupun melaksanakan hukum; 3). faktor sarana ataupun fasilitas yang menunjang penegakkan hukum; 4). faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana undang-undang itu berlaku ataupun diimplementasikan; dan 5). faktor budaya, meliputi hasil karya, cipta, serta rasa berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

G. Orisinalitas Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Orisinalitas
1.	Skripsi oleh Careno Bafaleo Tahun 2020 (Universitas Negeri Semarang)	Persamaan: Fokus penelitian yang membahas tentang pemanfaatan Indikasi Geografis terdaftar

¹⁵Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

¹⁶*Ibid*

¹⁷Soejono Soekanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.8.

	<p>“Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi di Kabupaten Temanggung)”</p>	<p>yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini mengkaji tentang realita efektivitas perlindungan hukum yang diberi pada petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing dalam produk kopi Arabika dan membahas tentang hambatan indikasi geografis terdaftar guna meningkatkan kesejahteraan petani kopi Arabika di Kabupaten Temanggung.</p>
2.	<p>Skripsi oleh Juni Clara Br Ginting Tahun 2020 (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)</p> <p>“Pemanfaatan Indikasi Geografis Atas Kopi Arabika Tanah Karo Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Kabupaten Karo”</p>	<p>Persamaan:</p> <p>Membahas mengenai pemanfaatan Indikasi Geografis terhadap potensi lokal yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peran pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan indikasi geografis bagi para petani.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai pemanfaatan perolehan indikasi geografis Kopi Arabika Tanah Karo oleh Petani Karo.</p>
3.	<p>Skripsi oleh Henrikus Indhayana Yudha Prasetya Tahun 2019 (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)</p> <p>“Peran Komunitas Perlindungan Salak Pondoh Sleman dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja”</p>	<p>Persamaan:</p> <p>Fokus penelitian membahas mengenai pemanfaatan Indikasi Geografis terhadap sebuah produk potensi indikasi geografis.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini menganalisis mengenai peranan Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis dalam pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja serta hambatan yang ditemui dalam meningkatkan penggunaan Indikasi Geografis Salak Pondoh di</p>

	Kabupaten Sleman.
--	-------------------

Sumber : Hasil Penelitian yang Telah Diolah

Tabel diatas merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian pada skripsi ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai Optimalisasi Hak Ekonomi Nanas Tangkit Baru Jambi Sebagai Produk Indikasi Geografis memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Careno Bafaleo (2020) dengan judul Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung). Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas dan kendala indikasi geografis terdaftar bagi peningkatan kesejahteraan petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing sesuai hasil penelitian di lapangan menunjukkan standar minimum harga jual yang dirasakan oleh petani kopi Temanggung sehingga pelaksanaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dan kendala dalam proses pendafran indikasi geografis adalah rendahnya kesadaran hukum petani kopi terkait indikasi geografis.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Juni Clara Br Ginting (2020) dengan judul Pemanfaatan Indikasi Geografis Atas Kopi Arabika Tanah Karo

Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Kabupaten Karo. Penelitian tersebut menganalisis mengenai bagaimana petani Karo memanfaatkan indikasi geografis untuk Kopi Arabika Tanah Karo dan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan indikasi geografis bagi para petani. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa petani Karo dapat memperdagangkan Kopi Arabika Tanah Karo dengan menggunakan tanda Indikasi Geografis untuk tujuan perdagangan. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Tanah Karo. Selanjutnya, peran pemerintah daerah Kabupaten Karo melalui Dinas Pertanian Kabupaten Karo membina para petani Kopi Arabika Tanah Karo mulai dari budidaya kopi hingga pengolahan kopi pasca panen. pasca panen sehingga dapat berkembang dengan baik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Henrikus Indhayana Yudha Prasetya (2019) dengan judul Peran Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja. Skripsi ini menganalisis tentang pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja dan kendala yang dihadapi oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Salak Pondoh Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan indikasi geografis Salak Pondoh Sleman Jogja telah dilakukan sesuai dengan hak eksklusif seperti mengambil nilai ekonomis, melakukan pembinaan kepada produsen lokal, melakukan

pengawasan, dan melakukan gugatan terhadap adanya pelanggaran. Adapun kendala yang dihadapi yaitu terganggunya reputasi karena adanya pelanggaran Indikasi Geografis akibat dari tidak dilakukannya pengawasan dan gugatan untuk menjaga reputasi bagi Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja yang menjadi dasar diberikannya hak eksklusif bagi Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Yuridis empiris atau penelitian lapangan merupakan metode yang diterapkan peneliti. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengkaji data sekunder lalu diteruskan dengan data primer di lapangan.¹⁸ Pada penelitian yuridis, hukum sebagai norma sebab pendekatan ini berhubungan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁹ Peneliti selanjutnya akan menganalisis masalah yang terjadi di masyarakat terkait perlindungan hukum atas komoditas potensi IG di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Lokasi tersebut

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 134.

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 20.

ditentukan dengan sengaja melalui pertimbangan bahwa Kecamatan Sungai Gelam adalah salah satu daerah penghasil nanas paling besar di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu, penentuan desa dilaksanakan di Desa Tangkit Baru yang menjadi pusat untuk mengembangkan serta memproduksi nanas terbanyak dengan luas lahan serta produksi paling tinggi yang rerata tanaman nanasnya sedang dalam masa produktif.²⁰

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Jenis data ini didapatkan langsung dari sumber yang terkait dengan masalah yang dikaji yaitu melalui pengamatan serta wawancara langsung pada pihak bersangkutan. Observasi adalah suatu metode yang mengamati dan meninjau langsung tempat penelitian. Sementara itu, wawancara adalah cara saat bertemunya subjek penelitian dengan peneliti selama tahap untuk memperoleh informasi sejalan dengan tujuan yang diteliti dan disesuaikan dengan tujuan peneliti menurut masalah yang hendak dibahas.

b. Data Sekunder

Perolehan data ini dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan teori, doktrin serta asas hukum, gagasan konseptual, dan temuan

²⁰Mirawati Yanita & Ira Wahyuni, "Kinerja Dan Efisiensi Rantai Pasok (Supply Chain) Nanas Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi" *SEPA : Universitas Jambi* Volume 17, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 144, tersedia di: <https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/view/43144>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023

sebelumnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, dan lainnya.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek individu, gejala, dan peristiwa, seperti perilaku, pola sikap, gejala, lokasi, dan waktu lain yang berupa sifat/ciri serupa untuk dikaji. Populasi tidak selalu berwujud manusia, tetapi juga dapat berupa perilaku politik, metode administratif pemerintahan, kasus hukum, ketentuan hukum, perilaku, gejala, dan lainnya.²¹ Populasi pada penelitian ini adalah Kelompok MPIG Nanas Tangkit, Kelompok Tani Desa Tangkit Baru, Dinas Perkebunan Kota Jambi, dan Balitbangda Kota Jambi.

b. Sampel

Bagian dari populasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian yang memakai metode tertentu dan selanjutnya bisa menjadi wakil melalui populasi yang menjadi fokus pada metode penelitian sosial/penelitian pada statistika disebut sampel.²² Pengambilan sampel dilakukan pada :

- 1 orang Ketua MPIG Nanas Tangkit
- 2 orang Ketua Kelompok Tani Desa Tangkit Baru

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 145.

²²Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.91.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan

Definisi observasi merupakan teknik untuk mengamati langsung oleh peneliti di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh fakta dan data yang diperlukan peneliti.

b. Wawancara

Teknik selanjutnya yang diterapkan peneliti ialah wawancara langsung yaitu melalui mengutarakan pertanyaan pada informan terkait permasalahan yang hendak diteliti. Wawancara tersebut dilaksanakan secara semi-terstruktur melalui penggunaan panduan wawancara, perekam suara, serta alat tulis.

“Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan berdasarkan kepada pertanyaan wawancara, namun pertanyaannya tersebut mungkin juga berasal dari instrumen pertanyaan yang sudah disiapkan. Keuntungan wawancara jenis ini adalah menggali lebih dalam serta memperoleh data yang lebih lengkap.”²³

6. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat, baik itu sekunder maupun primer atau data lain dengan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang diterapkan dalam penyelidikan, pencarian, menjelaskan, serta mendeskripsikan kekhasan ataupun kualitas dari dampak sosial yang

²³Kaharuddin, “Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi”, *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, Vol. IX, Issu 1, 2021, hal. 5, tersedia di <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4489/3096>, diakses pada 30 Juli 2023

tidak mampu diterangkan, diukur, ataupun dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.²⁴

Analisis data dilaksanakan melalui mengumpulkan data hasil wawancara berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan kepada informan. Dimulai dengan mengganti data wawancara yang direkam ke dalam format tertulis. Selanjutnya, data yang relevan dengan masalah yang diseleksi. Kemudian menafsirkan serta merumuskannya menjadi kalimat yang disusun secara sistematis, dan terakhir menarik kesimpulannya.

I. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyusun beberapa bagian yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penulisan. Untuk itu penulis membedakan tiap-tiap bab meliputi 4 (empat) bagian bab yang dibagi lagi dalam beberapa subbab yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini dipaparkan terkait pembahasan tentang tinjauan umum tentang Kekayaan Intelektual, tinjauan umum tentang Indikasi Geografis dan tinjauan umum tentang Nanas Tangkit Baru.

²⁴Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 23.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan uraian terkait hasil serta pembahasan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai bentuk manfaat ekonomi bagi masyarakat komunal yang tergabung dalam kelompok MPIG Nanas Tangkit Baru dan peranan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat Tangkit Baru.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan serta saran terkait permasalahan yang diteliti.